

PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI JALAN PANDANARAN

Oleh :

Arief Dwi Febriyanto, Kismartini

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Masalah yang muncul adalah siapakah aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran dan Apa perannya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran. Selain itu untuk mengetahui faktor pendorong & penghambat Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan, Non PNS yang direkrut Dishub, Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Masyarakat. Peran Dinas Perhubungan sebagai Pelaksana Kebijakan adalah terlibat langsung dalam pemungutan retribusi parkir, menentukan tarif kendaraan yang berlaku, menangani juru parkir liar dan memberi sanksi kepada pengendara yang parkir di sembarang tempat. Peran Non PNS sebagai Pelaksana Kebijakan adalah ikut membantu pegawai PNS Dinas Perhubungan dalam kegiatan penarikan retribusi parkir dan mencari lahan parkir baru jika dibutuhkan. Peran Satpol PP sebagai Pelaksana Kebijakan adalah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam kegiatan gabungan penarikan retribusi parkir dan menertibkan parkir-parkir liar. Peran Kepolisian sebagai Pelaksana Kebijakan adalah ikut membantu dalam kegiatan gabungan dalam penertiban parkir liar. Peran TNI adalah membantu dalam kegiatan gabungan dalam penertiban parkir liar dan merazia Bus yang surat-suratnya tidak lengkap dengan berkoordinasi dengan kepolisian. Peran masyarakat diantaranya memberikan rekomendasi, persetujuan dan pertimbangan terkait retribusi parkir kemudian mengawasi jika terdapat juru parkir liar.

Kata kunci: peran aktor, retribusi parkir, Struktur Birokrasi, SDM, Koordinasi

Abstract

Charges for parking is payment for the use of service parking lots determined by the government .The goal is to increase their own the area of a city semarang .The trouble is who is actors are involved in of policy parking retribution in Pandanaran Street and all its role? The purpose of this research is to find actors are involved in of policy parking retribution in Pandanaran Street .In addition to know factors driving & impediment to the implementation of the parking retribution policy. This study adopted qualitative approaches , type research descriptive .The research results show that actors in the implementation of the policy parking retribution is the office of transportation,non civil servants who were recruited Departement of Transportation Semarang City,Civil service police Unit, Police , army , and the community . The role of transportation department as the manager of policy is to engage directly in levies parking , determine the prevailing vehicle , handle illegal parking and impose sanction to motorists parked in any place. The role of non civil servants as the manager of policy is getting a help civil servant transportation department in the of levies parking and find parking lot new if needed.Than Civil service police Unit personnel as the manager of policy is coordinate with transportation department in the joint of levies parking and control Illegal Parking.The role of police as the manager of policy is getting a help in the combined in the control of illegal park .And the role of army is helping in the combined in the park controlling wild and raid bus of having no complete with coordinated with the police.The role of the people of them provide recommendations, approval and consideration related charges for parking then over if there are illegal parking.

Keywords : Role Actor, Parking Retribution, Biroctraton Structure, Human Resources, Coordination

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dana pembangunan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, retribusi daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah.

Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Parkir sendiri merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota seperti parkir tepi jalan umum dan parkir di sekitar lokasi event insidental (bersifat massal) yang diselenggarakan di Kota Semarang disebut retribusi parkir.

Retribusi parkir sendiri adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang mengatur Kebijakan Retribusi Parkir tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum didalamnya terdapat Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir Di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2012 pasal 33 yang menjadi obyek retribusi parkir adalah Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Tapi Kenyataanya di Lapangan masih belum berjalan secara optimal. Dengan bergantinya sistem dan pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Semarang nyatanya belum mampu mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain dampak dari kebijakan tersebut nyatanya malah menambah daftar masalah yang bahkan

selama ini tidak kunjung terselesaikan. Tidak sedikitnya parkir liar dan juru parkir liar di Kota Semarang juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Titik parkir liar yang memanfaatkan jalan raya dan trotoar banyak dijumpai di sepanjang jalan-jalan utama seperti jalan Pemuda, Kawasan Simpang Lima dan khususnya Jalan Pandanaran. Penertiban parkir liar dan juru parkir liar tidak membuahkan hasil. Mayoritas dari juru parkir liar tidak mau untuk menjadi anggota juru parkir resmi Dinas Perhubungan. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak tercapai dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan tarif karcis disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Kota Semarang, Hal ini mengharuskan Kota Semarang untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan Kota Semarang yang menangani masalah retribusi parkir di tepi –tepi jalan umum yang mengurus parkir di kawasan rekreasi dan tempat-tempat keramaian. Peran aktor disini masih kurang maksimal karena terlihat adanya juru parkir gelap yg masih banyak terjadi di kota semarang saat ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran
2. Untuk mengidentifikasi peran yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran
3. Untuk mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Retribusi Parkir

C. Kajian Teori

a) Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George C Edwards III terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Struktur Birokrasi
2. Sumberdaya
3. Komunikasi
4. Disposisi

Menurut Merice S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas : Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) yaitu Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

b) Teori Aktor dalam Implementasi

Menurut James Anderson aktor dalam Implementasi yang terlibat adalah

1. Birokrasi
2. Badan Legislatif
3. Lembaga Peradilan
4. Kelompok Kepentingan

c) Teori Peran

Menurut Marc J. Roberts peran yang terlibat dalam implementasi dilihat dari

1. Kedudukan
2. Perilaku
3. Target Kebijakan
4. Motif
5. Sumber daya

D. METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian tentang Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran ini menggunakan desain penelitian deskriptif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang ada dari lahirnya kebijakan retribusi parkir tersebut, disini belum ada hipotesis, namun sudah ada analisis meskipun belum begitu mendalam.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Masyarakat pengguna jasa parkir dan Juru parkir sebagai pengguna retribusi parkir

c. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung dari sumbernya (subyek penelitian). Data ini tidak berbentuk file-file atau dalam bentuk perhitungan, tetapi data ini diperoleh melalui narasumber atau dalam teknisnya responden yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Data primer

diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari pemerintah setempat maupun masyarakat secara langsung dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Penelitian ini mengambil data atau informasi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Masyarakat pengguna jasa parkir serta juru parkir sebagai pengguna retribusi parkir.

2. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti di luar lokasi penelitian, seperti melalui internet, pustaka, laporan penelitian, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi data dan informasi yang kurang atau yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder, tidak dilakukan wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui pekerja penyedia pelayanan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagaimacam teknik pengumpulan data diantaranya, yaitu:

1) Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan di manfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:191–193) sebagai berikut ini :

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3) Catatan Lapangan

Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan dia membuat catatan, setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan lapangan. Catatan yang di buat dilapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar,

dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk *catatan lapangan*. Catatan itu baru diubah ke dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas.

4) Penggunaan Dokumen

Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika penelitian menemukan record, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mengui, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan seluruh teknik pengumpulan data mulai dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Semarang yang melibatkan Ketua Seksi Pemungutan Bidang Perparkiran,

Kasi Data, Seksi Perijinan, Staff Bidang Perparkiran.

e. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002:103). Jadi, analisa data adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa sampai membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pengamat sendiri dan orang lain.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi pada penelitian kualitatif ini akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data lebih lanjut apabila diperlukan. Reduksi data dibantu

dengan notebook, komputer dan alat bantu lainnya.

2. Penyajian Data (Display data)

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut maka data penelitian akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dalam memahaminya. Menurut *Miles dan Huberman*, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak. Karena dalam penelitian atau temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap. Maka kesimpulan inilah dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. (Proses ini terakhir dilakukan setelah pengumpulan data semua selesai).

PEMBAHASAN

Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran

A. Identifikasi Aktor

Aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran adalah Birokrasi, Badan Legislatif, Lembaga Peradilan, dan Kelompok Kepentingan.

Birokrasi yang terlibat adalah Dinas Perhubungan dan NON PNS karena Birokrasi adalah Pelaksana Kebijakan yaitu Aktor yang terlibat dalam melaksanakan Kebijakan Retribusi Parkir yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh Perumus kebijakan lalu dilaksanakan Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang. Badan Legislatif yang terlibat adalah DPRD karena Badan Legislatif adalah aktor utama dalam Implementasi kebijakan retribusi Parkir, sejumlah aktor lain dan lembaga juga terlibat di dalam prosesnya. Lembaga Legislatif terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.

Lembaga Peradilan yang terlibat adalah Satpol PP, Kepolisian, dan TNI

karena Lembaga Peradilan merupakan aktor dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Lembaga peradilan merupakan cabang yudisial yang menangani Hukum Publik.

Kelompok Kepentingan yang terlibat adalah Masyarakat pengguna jasa parkir dan Juru parkir sebagai wajib retribusi parkir karena mereka salah satu Kelompok sasaran, Penerima Layanan dan Partisipasi Masyarakat.

B. Identifikasi Peran

a) Birokrasi

Kedudukan

Kedudukan Birokrasi disini adalah sebagai pelaksana kebijakan yang utama karena Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Non PNS yang terlibat langsung dalam Penarikan retribusi parkir.

Perilaku Birokrasi

Perilaku Birokrasi Dinas Perhubungan dan Non PNS muncul saat melaksanakan kegiatan penarikan retribusi parkir karena Peran dari Dinas Perhubungan adalah

1. Bidang Perparkiran terlibat langsung dalam kegiatan penarikan retribusi parkir

2. Bidang Perparkiran menentukan tarif kendaraan yang berlaku
3. Bidang Perparkiran memberi ijin kepada juru parkir resmi.
4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban terlibat langsung dalam menangani Juru Parkir Liar
5. Bidang Pengendalian dan Ketertiban memberi sanksi kepada pengendara bermotor maupun mobil yang parkir di sembarang tempat
6. Non PNS terlibat dalam kegiatan penarikan retribusi parkir
7. Non PNS membantu pegawai PNS untuk mencari lahan parkir baru jika dibutuhkan.

Target Kebijakan

Target Kebijakan dari Birokrasi Dinas Perhubungan disini adalah masyarakat pengguna jasa retribusi parkir dan Juru parkir resmi yang terlibat dalam penarikan retribusi parkir secara langsung.

Motif

Motif atau kepentingan aktor Birokrasi Dinas Perhubungan yang melatar belakangi aktor peduli terhadap masalah kebijakan yaitu banyaknya permasalahan-permasalahan retribusi parkir dan juru parkir liar yang tak kunjung selesai.

a) Badan Legislatif

Kedudukan

Kedudukan Badan Legislatif DPRD adalah sebagai pengawas jalannya kebijakan retribusi parkir sudah sesuai target atau belum.

Perilaku

Perilaku Badan Legislatif DPRD muncul saat mengawasi jalannya kebijakan dan saat ada masalah dalam kebijakan retribusi parkir karena peran dari DPRD adalah

- 1) Menyetujui anggaran pendapatan bidang perpajakan
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang perpajakan
- 3) Meminta Pertanggungjawaban atas target pendapatan yang ditetapkan

Target Kebijakan

Target Kebijakan dari DPRD adalah Dinas Perhubungan sebagai mitra DPRD untuk menyampaikan layanan retribusi parkir kepada masyarakat.

Motif

Motif atau kepentingan aktor yang melatar belakangi aktor peduli terhadap masalah kebijakan yaitu adanya masalah pada retribusi parkir dan Juru parkir liar yang marak terjadi di lapangan.

Sumber Daya

Sumberdaya DPRD adalah Jumlah pegawai dan sumber daya peralatan.

c) Lembaga Peradilan

Kedudukan

Kedudukan Lembaga Peradilan Satpol PP, Kepolisian dan TNI adalah sebaga mitra Dinas Perhubungan Kota Semarang yang membantu dalam Kegiatan Gabungan penarikan retribusi parkir.

Perilaku

Perilaku Lembaga Peradilan Satpol PP, Kepolisian dan TNI muncul saat mengawasi jalannya kebijakan dan saat ada masalah dalam kebijakan retribusi parkir karena peran dari Lembaga Peradilan adalah

Satpol PP

1. Satpol PP membantu dalam kegiatan penarikan retribusi parkir
2. Satpol PP menertibkan parkir-parkir liar yang marak terjadi di lapangan

Kepolisian

- 1) Kepolisian membantu dalam kegiatan gabungan Penertiban Parkir Liar

TNI

1. TNI ikut membantu jika ada kegiatan gabungan dengan kepolisian dan Satpol PP.
2. TNI ikut membantu Penertiban Parkir Liar dan Merazia Bus yang surat-suratnya tidak lengkap

Target Kebijakan

Target Kebijakan dari Satpol PP, Kepolisian dan TNI adalah Dinas Perhubungan sebagai mitra untuk membantu dalam kegiatan penarikan retribusi parkir kepada juru parkir dan penertiban parkir liar serta juru parkir liar.

Motif

Motif atau kepentingan aktor yang melatar belakangi aktor peduli terhadap masalah kebijakan yaitu adanya masalah pada retribusi parkir dan Juru parkir liar yang marak terjadi di lapangan dan membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir karena satpol PP, Kepolisian, TNI adalah mitra pemerintah.

Sumber Daya

Sumberdaya Satpol PP, Kepolisian dan TNI adalah Jumlah pegawai dan sumber daya peralatan

d) Kelompok Kepentingan

Kedudukan

Kedudukan Masyarakat adalah sebagai pengguna jasa retribusi parkir

Perilaku

Perilaku masyarakat muncul saat ada kesalahan pada retribusi parkir dan melihat juru parkir liar untuk segera melapor karena peran dari kelompok kepentingan disini sebagai

- a) Kelompok sasaran adalah masyarakat karena kebijakan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dan dibuat suatu kebijakan nantinya yang terlibat adalah masyarakat pengguna jasa parkir dan Juru parkir yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan.
- b) Penerima Layanan adalah masyarakat sebagai penerima suatu kebijakan, karena mereka yang akan merasakan apakah kebijakan ini nantinya bisa berjalan secara efektif dan efisien apa belum dan yang terlibat adalah masyarakat pengguna jasa parkir dan Juru parkir yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan.

- c) Partisipasi Masyarakat, Karena masyarakat yang mengalami dampak yang buruk, sehingga kebijakan dibuat dengan sasaran untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat juga memberikan masukan/saran kepada pemerintah apakah kebijakan tersebut sudah berjalan secara efektif atau belum yang terlibat adalah masyarakat pengguna jasa parkir dan Juru parkir yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan.

Target Kebijakan

Target Kebijakan dari masyarakat sendiri karena kebijakan retribusi dibuat untuk mengurangi permasalahan jasa parkir.

Sumber Daya

Sumberdaya masyarakat adalah partisipasi mereka sendiri untuk sadar akan pentingnya kebijakan retribusi parkir

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Retribusi Parkir

Faktor Pendorong

1. Komunikasi

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Mitra Pemerintah dan Masyarakat sudah baik karena Komunikasi yang terjadi tidak ada tumpah tindih kewenangan karena sudah jelas Komunikasi yang terjalin dalam implementasi kebijakan retribusi parkir antara lain komunikasi dengan wajib retribusi sebagai target kebijakan dan pihak lain seperti Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Masyarakat yang berupa koordinasi dilapangan.

2. Disposisi

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana,

petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Disposisi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan pihak lain sudah baik karena Porsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan selaku implementor sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan tidak ada tumpang tindih kewenangan saat bertugas di lapangan. Koordinasi dengan Juru parkir sudah bagus karena langsung terjun ke lapangan untuk memberitahu kepada Juru parkir resmi.

3. Tingkat Kepatuhan

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana) hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Retribusi parkir sudah baik karena pada kenyataanya dengan membayar parkir di area parkir sesuai dengan peraturan yang ada. Juru parkir resmi juga merespon jika ada penarikan retribusi dari Dinas Perhubungan karena dari penarikan itulah bisa menambah PAD Kota Semarang. Masyarakat juga dihimbau agar menyampaikan lewat twitter Dinas Perhubungan dengan mention jika ada kesalahan-kesalahan juru parkir dengan menaikkan tarif parkir /karcis dan juga dihimbau untuk segera lapor jika melihat adanya juru parkir liar.

Faktor Penghambat

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kesimpulannya bahwa Implementasi kebijakan publik adalah tahap apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit).

Struktur Birokrasi yang ada pada Dinas Perhubungan masih kurang karena

terkait dengan Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang kurang jelas dan kurang rinci masih tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama juru parkir meskipun telah diberi sosialisasi oleh pihak Dinas Perhubungan.

5. Sumber Daya

Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan masih kurang karena Sumber daya peralatan masih kurang tersedia terutama sarana dan prasarana untuk juru parkir berupa rompi untuk beberapa juru parkir dan kurangnya mobil dinas jadi membuat petugas retribusi parkir sulit untuk turun ke lapangan

PENUTUP

Kesimpulan

Aktor yang berperan membantu pemerintah dalam proses pelaksanaan kebijakan retribusi parkir adalah Satpol PP, Kepolisian, TNI dan masyarakat. Satpol PP, Kepolisian, TNI membantu Dinas Perhubungan sebagai pihak ke tiga untuk membantu Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir. Aktor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan retribusi tempat khusus parkir. Selain itu, satpol PP dan TNI melakukan operasi Penertiban Juru parkir Liar. Upaya Operasi Penertiban Juru Parkir Liar ini merupakan suatu bentuk

mitra pemerintah yang dilakukan pihak ke tiga.

Berikut Aktor dan peran yang muncul

A. Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Perparkiran di dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir berperan

1. Bidang Perparkiran terlibat langsung dalam kegiatan penarikan retribusi parkir
2. Bidang Perparkiran menentukan tarif kendaraan yang berlaku
3. Bidang Perparkiran memberi ijin kepada juru parkir resmi.

Bidang Pengendalian dan Penertiban di dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir berperan

- 1) Bidang Pengendalian dan Ketertiban terlibat langsung dalam menangani Juru Parkir Liar
- 2) Bidang Pengendalian dan Ketertiban yang berhak memberi sanksi kepada pengendara bermotor maupun mobil yang parkir di sembarang tempat

B. Non PNS

1. Non PNS terlibat dalam kegiatan penarikan retribusi parkir
2. Non PNS membantu pegawai PNS untuk mencari lahan parkir baru jika dibutuhkan.

C. DPRD

- 1) Menyetujui anggaran pendapatan bidang perparkiran
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang perparkiran

- 3) Meminta Pertanggungjawaban atas target pendapatan yang ditetapkan

D. Satpol PP

- 1) Satpol PP membantu dalam kegiatan penarikan retribusi parkir
- 2) Satpol PP menertibkan parkir-parkir liar yang marak terjadi di lapangan

E. Kepolisian

1. Kepolisian membantu dalam kegiatan gabungan Penertiban Parkir Liar

F. TNI

- 1) TNI ikut membantu jika ada kegiatan gabungan dengan kepolisian dan Satpol PP.
- 2) TNI ikut membantu Penertiban Parkir Liar dan Merazia Bus yang surat-suratnya tidak lengkap

G. Masyarakat

1. Masyarakat sebagai kelompok kepentingan
2. Masyarakat sebagai Penerima Layanan
3. Masyarakat sebagai partisipasi Masyarakat

Faktor yang mendorong implementasi Kebijakan retribusi parkir ini adalah Komunikasi, Disposisi dan Tingkat Kepatuhan. Porsi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan selaku implementor sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Komunikasi yang terjadi tidak ada tumpah tindih kewenangan karena sudah

jelas Komunikasi yang terjalin dalam implementasi kebijakan ini antara lain komunikasi dengan wajib retribusi sebagai target kebijakan dan pihak lain yang berupa koordinasi dilapangan. Tingkat kepatuhan masyarakat dengan membayar parkir di area parkir sesuai dengan peraturan yang ada. Juru parkir resmi juga merespon jika ada penarikan retribusi dari Dinas Perhubungan karena dari penarikan itulah bisa menambah PAD Kota Semarang. Masyarakat juga dihimbau agar menyampaikan lewat twitter Dinas Perhubungan dengan mention jika ada kesalahan-kesalahan juru parkir dengan menaikkan tarif parkir /karcis dan juga dihimbau untuk segera lapor jika melihat adanya juru parkir liar.

Faktor yang menghambat implementasi Kebijakan retribusi parkir adalah struktur birokrasi dan sumber daya. Struktur Birokrasi yaitu terkait dengan Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang kurang jelas dan kurang rinci masih tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama juru parkir meskipun telah diberi sosialisasi oleh pihak Dinas Perhubungan. Sumber daya peralatan masih kurang tersedia terutama sarana dan prasarana untuk juru parkir berupa rompi untuk beberapa juru parkir dan kurangnya

mobil dinas jadi membuat petugas retribusi parkir sulit untuk turun ke lapangan.

Saran

- a) Terkait dengan Struktur Birokrasi pada point pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir belum dicantumkan terkait besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi
- b) Terkait dengan Sumber daya Pengadaan fasilitas tersebut dapat diberikan satu paket ketika juru parkir mendaftar sebagai anggota juru parkir Dinas Perhubungan dan penambahan fasilitas untuk Petugas penarik retribusi parkir seperti mobil dinas.
- c) Terkait dengan Komunikasi maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk meminta karcis parkir agar mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir.
- d) Terkait Disposisi maka perlu adanya Pendataan titik parkir dan juru parkir secara uptodate untuk mengontrol besarnya potensi pendapatan dari retribusi parkir.
- e) Terkait Tingkat Kepatuhan maka perlu adanya Sosialisasi lebih yaitu dengan mengadakan Himbauan-

himbauan turun ke jalan membagikan pamflet tentang pentingnya retribusi parkir untuk PAD Kota Semarang, karena nantinya PAD ini untuk Fasilitas masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku & Jurnal

Indiahono, Dwiyanto.2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic

Policy Analysis. Yogyakarta:Gaya Media

Kencana, Inu Syafiie.2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta:Rineka Cipta

Kusumanegara, Solahuddin.2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gaya Media

Nugroho, Riant.2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo

Winarno,Budi.2007.Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta:MediaPressindo

Moelong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik.Bandung: PenerbitAlfabet

Anderson, James .(2003). Public Policy Making. Houghton Mifflin Company. Arikunto, Suharsimi,1996.

Raho, Bernard. (2007). Modern Sociological Theory Jakarta : Raja Grafindo

Wirutomo. (1981) . The Functons of Social Conflict Glencoe, IL: Free Press

Marc J. Roberts. Organizational Change Harvard Business: North River Press

Harlan Evan Kapioru, 2014, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum" Jurnal Nominal. Volume 3, No 1

Handalina Nina Soza,"Penyelenggaraan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Di Kota Denpasar". Volume 2, No 4

Fitri Ramadani Februari 2015,"Peran Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013".Jom Fisip.Volume 2,No.1

Biddle & Thomas. (1966) . Jurnal Volume 17 Role Theory: Concepts and Research

Dokumen

Riwayat Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Target dan Realisasi PAD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2016